PRODUK PELAYANAN DINAS KOMINFOSTAN KABUPATEN DELI SERDANG

1. PENAYANGAN VIDEO/ KONTEN VIDEOTRON

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
		Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2.	Persyaratan Pelayanan	2008 Tentang Informasi Publik a. Permohonan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/
۷.	1 Crayaratari i Ciayariari	Instansi Vertical/ Pemerintah Desa (PEMDES)
		b. Menyerahkan video/ konten tidak bersifat komersil, tidak
		bersifat pornografi, porno aksi, tidak bersifat SARA dan
		video berdurasi maksimal 5 menit
3.	Sistem, Mekanisme dan	A. <u>Persiapan konten</u>
	Produser	Permintaan Penayangan Pibak yang membutuhkan penayangan kentan barua.
		a) Pihak yang membutuhkan penayangan konten harus mengajukan permohonan tertulis kepada
		kepala dinas informasi dan komunikasi.
		b) Permohonan harus mencakup deskripsi konten,
		durasi penayangan dan periode penayangan.
		Verifikasi dan Persetujuan
		a) Konten yang diajukan akan diverifikasi oleh Tim
		Verifikasi Konten untuk memastikan kesesuaian
		dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. b) Kepala Dinas Informasi Komunikasi Statistik dan
		Persandian memberikan persetujuan tertulis untuk
		konten yang telah diverifikasi.
		3. Pengolahan Konten
		a) Konten yang telah disetujui diolah dan disesuikan
		dengan format yang kompatibel untuk ditayangkan
		divideotron.
		 b) Tim teknis videotron bertanggung jawab atas pengolahan teknis konten.
		B. Penayangan Konten
		4. Penjadwalan Penayangan
		a) Tim penjadwalan membuat jadwal penayangan
		berdasarkan permintaan dan ketersediaan slot
		penayangan.
		 b) Jadwal Penayangan diumumkan kepada pihak terkait dan disimpan dalam arsip digital.
		5. Penayangan
		a) Konten ditayangkan sesuai dengan jadwal yang telah
		ditentukan.
		b) Operator Videotron memastikan konten ditayangkan
		dengan kualitas gambar dan suara yang optimal.
		6. Monitoring dan Evaluasi
		a) Selama penayangan, Tim monitoring memantau kualitas dan ketetapatan penayangan.
		b) Setelah penayangan selesai, dilakukan evaluasi
		untuk menilai efektivitas dan menyusun laporan
		penayangan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Jam
5. 6.	Biaya/Tarif	Gratis Panayangan Vidoo/ Konton
7.	Produk Pelayanan Sarana, Prasaranan, dan/ atau	Penayangan Video/ Konten Kamera, Alat Perekam
, . 	Fasilitas	Namora, Alact Glokalli
8.	Kompetensi Pelaksanan	Membuat laporan berita yang telah disebarluaskan kepada
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistiik dan Persandian
	Day nave and lat	Kabupaten Deli Serdang
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang

		- Pranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran	Telepon: (061) 7951852/ 081370701783
	dan Masukan	Email: diskominfostan@deliserdangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

2. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DISKOMINFOSTAN KAB. DELI SERDANG

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 btentang keterbukaan informasi publikj Peraturan komisi informasi nomnor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi 2ublic Peraturanmenteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	OPD Kabupaten Deli Serdang ataupun warga masyarakat terkait adanya penyampaian informasi harus melengkapi syarat sbb: a. Identitas Diri/ Fotocopy KTP b. Badan 2ubli anggran dasar yang disahkan kemenkumham c. Kelompok orang surat kuasa dan fotocopy KTP d. Badan public surat keputusan dan fotocopy KTP e. Website PPID
3.	Sistem, Mekanisme dan Produser	 Ajukan Permohonan Informasi melalui Surat, Datang Langsung Email ke PPID Lembaga. Persyaratan Permohonan Dokumen Informasi Publik Pribadi Fotocopy KTP Badan Hukum Anggaran Dasar yang disahkan KEMENHUMKAM Kelompok Orang Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Badan Publik Surat Keptusan dan Fotocopy KTP Dokumen Permohonan tidak lengkap Klarifikasi Pemberian tanda bukti Permohonan melengkapi berkas Dokumen Permohonan Lengkap Pemberian Tanda Bukti Mencatat dalam buku register (Diberikan 10 hari bekerja dan apabila waktu untuk pemberian dokumen belum menaggapi dan mohon ditambah 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis). Apabila tidak memeberikan tanggapan pemohon ajukan keberatan ke atasan PPID.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 17 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi 2ublic dapat

		molekukan nenggendeen/fotoony eendiri eteu menyediakan
		melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan
		CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan
		informasinya
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
7.	Sarana, Prasaranan, dan/ atau Fasilitas	Komputer, Printer, Hardisk dan Scanner
8.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan
		permasalahan
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang
		- Pranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran	SP4N Lapor di website : www.lapor.go.id
	dan Masukan	Secara langsung pada Bidang Informasi dan Komunikasi
		Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
		Persandian Kabupaten Deli Serdang
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah
	, and a second s	sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung
		iawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan	,
10.		Di 30 Neterlagakerjaan dan Di 30 Neseriatan
4.4	Keselamatan Pelayanan	Frebrei negenege standert nelevenege ist dilekultar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan
		minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
		pelayanan

3. PELAYANAN PENGADUAN SP4N-LAPOR

3. PE	PELAYANAN PENGADUAN SP4N-LAPOR		
No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 416 Tahun 2023 tentang tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator sistem pengelolaan dan pengaduan online rakyat pada perangkat daerah	
2.	Persyaratan Pelayanan	OPD Kabupaten Deli Serdang ataupun warga masyarakat terkait adanya penyampaian informasi harus melengkapi syarat sbb : a. Identitas Diri b. Menyampaikan informasi jenis laporan penyampian informasi diserta dengan alat bukti berupa dokumen lokasi penyampaian informasi	
3.	Sistem, Mekanisme dan Produser	 Sampaikan Laporan ke laman website Lapor.go.id Memverifikasi, menelaah dan mendisposisi laporan ke Admin Instansi K/L/D Laporan Masyarakat waktunya 1 sd 3 Hari Laporan Lengkap (Detail dan Data Pendukung). Memverifikasi dan Mendidposisi Laporan, Jika Laporan Tersebut sesuai Kewenangan Instansi diteruskan ke Pejabat Penghubung (OPD/Kecamatan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan Super Admin. Laporan lengkap (detail dan data pendukung dengan waktu 3 sd 5 hari laporan diberikan respon dan / atau diteruskan keunit terkait. Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin Instansi. Laporan lengkap detail dan data pendukung waktu 5 sd 10 hari laporan yang ditindaklanjuti (jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai. Jika tidak ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja maka laporan tersebut diteruskan system ke OMBUDSMAN RI. 	

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 - 5 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengaduan SP4N-LAPOR
7.	Sarana, Prasaranan, dan/ atau Fasilitas	Komputer, Printer, Hardisk dan Scanner
8.	Kompetensi Pelaksana	Data Respon dan Survei Kepuasan Masyarakat yang masuk di lapor.go.id
9.	Pengawasan Internal	Kepala BidangPranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang IKP
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

4. PELAYANAN TALKSHOW

	LA TANAN TALKSHOW	
No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Surat Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 521 tahun 2009
		tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa
		Penyiaran Radio Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2.	Persyaratan Pelayanan	OPD Kabupaten Deli Serdang ataupun warga masyarakat
		terkait adanya penyampaian informasi harus melengkapi
		syarat sbb:
		Surat permohonan yang ditujukan kepada Kominfostan
		dari OPD ataupun masyarakat
3.	Sistem, Mekanisme dan Produser	 OPD ataupun masyarakat mengajukan permohonan siaran secara tertulis melalui surat resmi. Permohonan harus mencakup informasi lengkap seperti nama lembaga/dinas/instansi/masyarakat, materi siaran, kontak person, tujuan siaran, topik siaran, durasi siaran dan tanggal serta waktu yang diinginkan. Tim verifikasi radio menerima permohonan dan melakukan verifikasi informasi yang diajukan. Jika informasi lengkap dan memenuhi syarat, kepala dinas komunikasi informasi statistik dan persandian memberikan persetujuan secara tertulis untuk permohonan siaran radio tersebut. OPD atau Masyarakat diberikan jadwal siaran dan panduan teknis yang telah disesuaikan. OPD dan Masyarakat berkoordinasi dengan operator radio untuk persiapan teknis, termasuk uji coba siaran jika diperlukan. Operator Radio memastikan semua peralatan dan fasilitas siaran siap digunakan. OPD dan Masyarakat menyerahkan materi siaran (naskah, musik dll) kepada operator radio sesuai dengan panduan yang diberikan. OPD dan Masyarakat hadir distudio radio sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		 yang telah ditentukan. Operator radio mendampingi pemohon selama siaran
		untuk memastikan kelancaran teknis
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis

6.	Produk Pelayanan	Talkshow
7.	Sarana, Prasaranan, dan/ atau	Kamera, Perekam Suara, Lighting, Mixer, Komputer dan
	Fasilitas	Microphone
8.	Kompetensi Pelaksana	Terselenggaranya kegiatan talkshow dan tersampaikannya
		program dan kebijakan pemerintah secara mudah kepada
		masyarakat
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang
		- Pranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran	Bidang IKP
	dan Masukan	
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah
		sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung
		jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
	Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan
		minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
		pelayanan

5. PELAYANAN PODCAST CAKEP DI BALKON

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/ Kota OPD Kabupaten Deli Serdang ataupun warga masyarakat
2.	1 ordyanatan 1 olayanan	terkait adanya penyampaian informasi harus melengkapi syarat sbb : Surat permohonan yang ditujukan kepada Kominfostan dari OPD ataupun masyarakat
3.	Sistem, Mekanisme dan Produser	 Permohonan atau mengajukan permohonan program atau kegiatan untuk mengisi acara podcast Meneliti surat permohonan program atau kegiatan untuk mengisi acara podcast Jafung membuat jadwal program atau kegiatan untuk mengisi acara podcast Kabid Komunikasi Publik memeraf jadwal program atau kegiatan untuk mengisi acara podcast Sekdis meneliti jadwal program atau kegiatan mengisi acara podcast jika sudah sesuai diparaf dan diberikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani jika belum dikembalikan ke Kepala Bidang Kepala Dinas menadatangani jadwal program atau kegiatan untuk mengisi acara podcast Pemohon atau OPD menerima jadwal program atau kegiatan untuk mengisi acara podcast
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Podcast
7.	Sarana, Prasaranan, dan/ atau Fasilitas	Kamera, Perekam Suara, Lighting, Mixer, Komputer dan Microphone
8.	Kompetensi Pelaksana	Tersampaikannya isu dan program strategis pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat dengan mudah berimbang dan fakrtual

9.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang
		- Pranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran	Bidang IKP
	dan Masukan	
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah
		sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung
		jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
	Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan
		minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
		pelayanan

6. PELAYANAN PELIPUTAN

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
2.	Dasar Hukum Persyaratan Pelayanan	 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/ Kota Agenda pemerintah /Undangan Perangkat Daerah yang
		menyampaikan informasi dengan melengkapi syarat sbb: a. Nama kegiatan b. Tanggal dan waktu c. Tempat
3.	Sistem, Mekanisme dan Produser	 Kepala Seksi melakukan penugasan kepada tim redaksi untuk pembuatan rencana liputan, pencarian dan penetuan tematik, agenda/ undangan OPD untuk liputan Tim redaksi melakukan penyusunan jadwal dan tematik untuk peliputan selama 1 bulan Kepala Seksi melakukan pemeriksaan kembali tematik dan jadwal tim liputan. Jika ya maka Kepala Seksi menugaskan tim liputan untuk turun ke lapangan mengambil data, jika tidak maka staf redaksi harus menyusun kembali tema/ jadwal tim liputan Tim peliput ke lapangan dan mengumpulkan data sesuai jadwal yang sudah ditentukan Tim peliput melakukan pengolahan, pembuatan informasi/ berita Tim redaksi melakukan proses editing sebelum di upload Operator melakukan penyajian/ upload informasi/berita Operator melaukan pengiriman rilis berita
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Berita Media Sosial
7.	Sarana, Prasaranan, dan/ atau Fasilitas	Kamera, Perekam Suara, Drone dan Lighting
8.	Kompetensi Pelaksana	Menerima dan memproses program atau kegiatan yang berupa ceremonial atau yang berupa rapat koordinasi untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat
9.	Pengawasan Internal	Kepala BidangPranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang IKP

11.	Jumlah Pelaksana		Disesuaikan dengan jumlah kegiatan pimpinan
12.	Jaminan Pelayanan		Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

7. PELAYANAN PENYEBARAN INFORMASI

	ELAYANAN PENYEBARAN INFO	KIVIASI	
No.	Komponen Standar Pelayanan		Keterangan
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
		0	Keterbukaan Informasi Publik
		2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		2	Pelayanan Publik
		3.	Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
		4	Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun
			2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		5.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
			telekomunikasi (Lembaga Negara Republik
			Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
			Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
		6.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
			informasi dan transaksi Tambahan Lembaran Negara
		_	Republik Indonesia Nomor 4843)
		7.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
			keterbukaan informasi public (Lembaran Negara
		0	Republik Indonesia 5038)
		0.	Undang-undnag Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 5038)
		q	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
		J.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
			Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
			Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang
			perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun
			2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
			undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 6398)
		10	. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
			tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
		11	Prosedur Administrasi Pemerintahan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
		11	2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
			Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
			Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
		12	. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
		_	Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang
			Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara
			Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 2015 Nomor 209)
		13	. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
			Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang

		penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang 15. Peraturan Bupati Deli Serdang No. 107 Tahun 2021 tentang Penyelnggaraan Sistem Pemerintahan
		Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
2.	Persyaratan Pelayanan	Agenda pemerintah /Undangan Perangkat Daerah yang menyampaikan informasi dengan melengkapi syarat sbb : a. Nama kegiatan b. Tanggal dan waktu c. Tempat
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Menerima bahan liputan dari tim Peliput/Pengumpul Informasi Mengolah informasi menjadi berita Sebelum disebarluaskan berita tersebut dikoreksi oleh Tim Pengolah Informasi Siap untuk disebarluaskan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	Media Sosial : Instagram, Facebok, Website Pemkab
7.	Saranan, Prasaranan, dan/Atau Fasilitas	
8.	Kompetensi Pelaksana	Tersampaikan semua informasi yang harus disebarluaskan ke masyarakat melalui semua platform media social Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang - Pranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang IKP
11.	Jumlah Pelaksanan	Disesuaikan dengan jumlah kegiatan pimpinan
12.	Jaminan Pelaksanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

8. TANDA TANGAN ELEKTRONIK/ DIGITAL BALAI SERTIFIKAT ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		2. Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 41 tahun 2022
		tentang penyelenggaraan sertifikat elektronikdi
		nlingkungan pemerintah kabupaten deli serdang
2.	Persyaratan Pelayanan	OPD, Kecamatan, Puskesmas dan Kepala Desa,
		Kabupaten Deli Serdang harus melengkapib syarat sbb :
		a. Identitas diri/ fotocopy ktp
		b. Surat SK Terakhir Jabatan/SK Bupati Deli Serdang
		c. Surat rekomendasi Kepala Dinas/ Badan/ Camat/
		Kepala Puskesmas
		d. Mengisi formulir pengajuan TTE personal

3.	Sistem, Mekanisme dan Produser	 Siapkan berkas Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik(TTE) Lapor dengan petugas Tanda Tangan Elektronik(TTE) Petugas Tanda Tangan Elektronik(TTE) Memeriksa kelengkapan berkas Pendaftaran Petugas Tanda Tangan Elektronik(TTE) Membuat Email Pengguna dan Mendaftarkan Pegawai ke
		Portal BSRE Pegawai Menerima Email Tanda Tangan Elektronik Pegawai Melakukan Aktivasi melalui link yang telah
		dikirimkan pada Email Tanda Tangan Elektronik(TTE) dan mengisi data dengan benar Setelah Aktivasi berhasil, Pegawai membuat Passpharase melalui link yang dikirimkan pada Email Tanda Tangan Elektronik(TTE) Proses Pendaftaran baru Akun Tanda Tangan Elektronik(TTE) telah selesai+
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis tanpa dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Elektronik
7.	Sarana, Prasaranan, dan/Atau Fasilitas	Komputer, Internet, Aplikasi
8.	Kompetensi Pelaksanan	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Bidang - Pranata Humas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

9. PELAYANAN PEMBUATAN AKUN EMAIL

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik)
		 Indonesia Nomor 5038) 4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 5. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

2.	Persyaratan Pelayanan	Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran negara republic Indonesia tahun 2019 nomor 183 tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 6398) Mengirim surat permohonan kepada Kepala Dinas
2.	r crayaratarr ciayariarr	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 OPD mengajukan pembuatan email kepada Dinas Kominfostan Kabid TIK memverifikasi kelengkapan permohonan pembuatan email, jika persyaratan sudah lengkap selanjutnya kabid TIK memerintahkan admin server untuk pembuatan email Admin server melakukan pendaftaran email dan akan diperoleh: Alamat dan Password Email Dinas kominfo mengirimkan surat balasan kepada OPD OPD menerima surat balasan dari dinas kominfostan yang berisi: Alamat dan Password Email
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Akun Email dengan Domain : @deliserdangkab.go.id
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang TiksanManggala Informatika
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

10. PELAYANAN FASILITAS LAPORAN GANGGUAN INTERNET KECAMATAN, PUSKESMAS DAN OPD

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran negara republic Indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3881) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4846)
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan permohonan secara langsung atau melalui telepon

3.	Sistem, Mekanisme, dan Produser	 Memberikan data PIC (person in charge) berupa : nomor HP/Whatsapp PIC pelapor, lokasi, jenis gangguan Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kominfostan OPD, Kecamatan dan Puskesmas Melaporkan permasalahan gangguan Jaringan Internet ke Teknisi Jaringan melalui Via WhatsApp/Telepon Teknisi Jaringan mengkoordinasikan permasalahan ke Admin Jaringan Teknisi melakukan perbaikan permasalahan yang ada di lapangan Teknisi melaporkan ke Admin Jaringan/Atasan Permasalahan jaringan internet telah selesai di perbaiki
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	Layanan fasilitasi laporan gangguan internet OPD, Kecamatan dan Puskesmas
7.	Saranan, Prasarana dan/atau Fasilitas	Laptop, Internet, Tangga
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undangan Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	
10.	Penanganan Pengaduan, Saan dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

11.PELAYANAN FASILITASI PENYELENGGARAAN VIDEO CONFRENCE

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		3. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 181 Tahun 2022 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Keputusan Bupati DS ttg Peta Rencana SPBE
2.	Persyaratan Pelayanan	OPD Kabupaten Deli Serdang ataupun warga masyarakat terkait adanya penyampaian informasi harus melengkapi syarat sbb : a. Nama kegiatan b. Tanggal dan waktu c. Tempat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pihak OPD mengajukan surat permohonan Fasilitas alat Zoom dan Operator Zoom ke Bagian Umum Dinas Kominfostan Bagian Umum menerima dan mendisposisikan surat permohonan kepada Kabid TIKSAN

		 Kabid TIKSAN Menerima dan Memerintahkan Petugas untuk memfasilitasi alat Zoom dan Petugas Operator Zoom Petugas Operator Zoom langsung menindaklajuti dan memfasilitasi kebutuhan Zoom terkait permintaan dari OPD yang mengajukan surat.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	Video conference
7.	Sarana, Prasaranan dan/Atau Fasilitas	Komputer, Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

12. PELAYANAN REKAMAN CCTV

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran negara republic Indonesia tahun 199 nomor 154, tambahan lembaran negara republic indonesia nomor 3881)
2.	Persyaratan Pelayanan	Melengkapi Persyaratan sebagai berikut: 1.Mengisi buku tamu 2.Memberikan SPT 3.Menandatangani berita acara penyerahan rekaman CCTV
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengirimkan surat permohonan melihat/meminta Rekaman CCTV kepada Dinas Kominfostan melalui Bagian Umum Bagian Umum menerima dan mendisposisikan surat permohonan kepada Kabid TIKSAN Kabid TIKSAN Menerima dan mendisposisikan surat permohonan ke Kasi Pelayanan TIK Kasi Pelayanan Menerima surat permohonan dan disposisi dari Bagian Umum Kasi Pelayanan TIK menugaskan Admin CCTV untuk membuka dan memperlihatkan Rekaman ulang CCTV yang di perlukan Admin CCTV membuka dan memperlihatkan kepada pemohon Rekaman ulang CCTV yang di perlukan melalui TV Wall Pemohon melihat Rekaman CCTV, Jika pemohon membutuhkan Soft Copy Rekaman CCTV Pemohon harus memberikan Flashdisk/Hardisk kepada Admin CCTV, jika tidak perlukan maka pemutaran CCTV selesai. Admin CCTV mengcopy rekaman CCTV yang di perlukan dan memberikan nya kepada Pemohon Pemohon menerima Softcopy Rekaman CCTV yang di perlukan

4.	Jangka Waktu Danyalagaian	 Admin CCTV membuat berita acara dan laporan hasil pemutaran Rekaman ulang CCTV yang di butuhkan, Selanjutnya melaporkan kepada Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan TIK Menerima berita acara dan laporan hasil pemutaran CCTV
5.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	File Rekaman CCTV
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	THE INGRAHIAH COTV
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang TiksanJabatan Fungsional Manggala Informatika
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

13. PELAYANAN PEMBUATAN VPS DI SERVER DISKOMINFOSTAN

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (Lembaran negara)
2.	Persyaratan Pelayanan	1.Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 OPD mengajukan pembuatan VPS untuk website/aplikasi kepada Dinas Kominfostan Kabid TIK memverifikasi kelengkapan permohonan pembuatan VPS, jika persyaratan sudah lengkap selanjutnya Kabid TIK memerintahkan admin server untuk pembuatan VPS Admin Server melakukan konfigurasi dan instalasi VPS website/aplikasi dan akan di peroleh: Alamat SSH Server, Username dan Password SSH Alamat IP Database, Username dan Password Database Dinas Kominfostan mengirimkan surat balasan kepada OPD OPD menerima surat balasan dari Dinas Kominfostan yang berisi:
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	VPS di server Diskominfostan dengan subdomain dari kominfostan.deliserdangkab.go.id 1.Alamat SSH Server, Username SSH dan Password SSH 2.Alamat Ip Database, Username dan Password Database

7.	Sarana, Prasaranan dan/atau Fasilitas	Komputer, Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang TiksanJabatan Fungsional Manggala Informatika
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

14. PELAYANAN CALL CENTER 112

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
		Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 21` Tahun 2008 tentang
		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10
		Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
2.	Persyaratan Pelayanan	Menerima panggilan darurat dari masyarakat
		 Menanyakan informasi insideng/ kejadian darurat Menanyakan dan mencatat/ input data rinci jenis insiden
		darurat, lokasi alamat, tanda kenal
		Menentukan jenis insiden darurat
		5. Menerima jenis insiden darurat, lokasi alamat
		Memeriksa kelengkapan informasi pada aplikasi
		7. Menentukan dan mengirimkan unit respon untuk
	0: 1	menangani insiden kedaruratan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Call Taker menerima panggilan darurat dari magyarakat
	Frosedui	masyarakat Call Taker menerima dan menanyakan informasi
		insiden/kejadian darurat. Apakah informasi yang di
		sampaikan tentang insiden darurat .
		Call Taker menanyakan dan mencatat/input data rinci
		jenis insiden darurat, lokasi alamat, tanda kenal
		Call Taker menentukan jenis insiden darurat kepada Dianatahan dan persentukan penangilan
		Dispatcher dan menutup panggilan Menerima informasi jenis insiden darurat, lokasi
		alamat
		Menerima informasi jenis insiden darurat, lokasi alamat
		Memeriksa kelengkapan informasi pada aplikasi
		Menentukan dan mengirimkan Unit Respon untuk
		menangani insiden kedaruratan sebagai berikut
		Update informasi lapangan saat sampai di lokasi insiden.
		insiden

		 Update Informasi lapangan saat proses dan selesai penanggulangan Memonitor update status insiden Status Ditutup (Closed)
4.	Jangka Waktu Penyelesian	Hari (disesuaikan dengan SOP masing-masing penyelenggara layanan darurat)
5.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Call Center 112
7.	Sarana, Prasaranan dan/atau Fasilitas	Bidang TIKSAN
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	Kepala BidangJabatan Fungsional Manggala Informatika
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tiksan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

15. PELAYANAN FASILITAS APLIKASI UNTUK OPD

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 154 tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3881) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4843) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronikdi lingkungan pemerintah kabupaten deli serdang

2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan aplikasi umum kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang yang dengan melengkapi : • Identitas Person in Charge (PIC) • Identitas peruntukan aplikasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 OPD mengajukan melalui surat permohonan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Dinas Kominfostan dengan OPD terkait membahas proses bisnis aplikasi Tim yang terdiri dari Dinas Kominfostan dan OPD terkait melaksanakan proses Pembangunan aplikasi
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Pengajuan pembuatan/ pengembangan aplikasi 1 Hari Proses pembuatan aplikasi 1 – 3 bulan
	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	 Pelayanan pembangunan dan pengembangan aplikasi Pelayanan pembangunan dan pengembangan website Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik (PSE)
7.	Sarana, Prasaranan dan/atau Fasilitas	Internet, Komputer, Aplikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undanganMemiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
9.	Pengawasan Internal	Kepala BidangJabatan Fungsional Pranata Humas
10.	Penangann Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang LPBE
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin ke absahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan

16. PELAYANAN PERMINTAAN DATA STATISTIK SEKTORAL

No.	Komponen Standar Pelayanan	Keterangan
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang
2.	Persyaratan Pelayanan	OPD: Melalui surat resmi yang dikirimkan ke Dinas Kominfostan Atau Melalui email: diskominfostan@deliserdangkab.go.id atau bidangstatistikkominfostan@gmail.com Masyarakat Umum: Surat permohonan melalui email: diskominfostan@deliserdangkab.go.id atau

		bidangstatistikkominfostan@gmail.com atau bisa datang langsung ke Dinas Kominfostan KTP/identitas diri
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Permohonan Layanan Data Sektoral atau update data di datadeliserdangkab.go.id dari Instansi, Ormas/Lembaga Verifikasi permohonan data sektoral dan update data oleh tim verifikator Admin meneruskan kepada fungsional, Untuk diteruskan dan dimohonkan persetujuan kepada Kabid/ Kepala dinas Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada produsen data terkait permohonan data sektoral atau update data. Memberikan data sektoral yang dimohon kepada pemohon atau melakukan update data pada website pusat data
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya)
6.	Produk Pelayanan	Data sektoral, Surat rekomendasi kegiatan statistik, Layanan portal satu data
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Serve, Perangkat Komputer, Jaringan Internet dan Aplikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan tentang Statistik, Pengolahan Data dan Analisi Data serta Keahlian Teknologi Informasi
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda
10.	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Data sektoral, Surat rekomendasi kegiatan statistik, Layanan portal satu data
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, transparan dan mudah sesuai dengan standar pelayanan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Disimpan dalam google drive
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standart pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan